

ANALISIS FAKTOR PENGARUH DAN PEMODELAN TINGKAT KEMISKINAN SECARA SPASIAL DI INDONESIA

Elysia Nuril Mukarromah¹⁾, Rendra Erdkhadifa²⁾

¹ FEBI, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, Indonesia
e-mail : elysnuril@gmail.com

² FEBI, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, Indonesia
e-mail : rendra.erdkhadifa@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to determine the poverty rate model and to measure the effect of education, unemployment, inflation, minimum wages and health on poverty levels in 34 provinces in Indonesia. The data of this research is sourced from secondary data that has been published by BPS Indonesia in 2021. The data taken were analyzed using spatial regression analysis techniques with the weighted function of the selected model using Adaptive Bisquare. The results of the study indicate that all independent variables have a significant influence on the poverty level and it can be seen that based on the results of the grouping, there are 10 provincial groups with the same significance of the independent variables.

Keywords: Economics, Poverty, GWR

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi suatu negara merupakan salah satu upaya yang penting dilakukan. Setiap negara akan terus berupaya dalam memperbaiki perekonomiannya agar pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dapat optimal. Pembangunan ekonomi akan memberikan dampak yang baik bagi tingkat kesejahteraan masyarakat [1]. Dengan pembangunan ekonomi, masyarakat akan lebih mudah dalam meningkatkan pendapatan untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Selain itu pemerintah juga akan lebih mudah dalam memperbaiki struktur ekonomi serta memudahkan dalam mengentaskan ketimpangan sosial pada masyarakat. Sehingga output yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik pada pengentasan kemiskinan yang utamanya disebabkan oleh tingginya perbedaan pendapatan dan tingkat pengangguran [2].

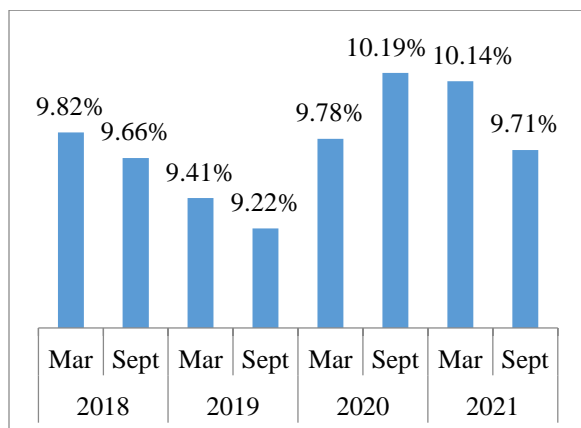
Kemiskinan dalam masyarakat dapat diartikan sebagai rendahnya standar tingkat kualitas ekonomi. Kemiskinan terjadi akibat tingginya perbedaan kemampuan, kesempatan maupaun pendapatan dalam memenuhi kebutuhan hidup [3]. Masyarakat yang berada

pada kondisi standar hidup miskin akan memiliki tingkat kesenjangan sosial maupun ekonomi dalam bermasyarakat. Kemiskinan akan cenderung menyebabkan ketimpangan dalam berbagai aspek kehidupan baik dari jangkauan akses kesehatan maupun akses pendidikan yang berkualitas. Sehingga masyarakat yang berada pada garis kemiskinan akan mendapatkan kesulitan terutamanya dalam melanjutkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, memenuhi kebutuhan dasar serta mendapatkan kesehatan yang baik [4].

Kemiskinan masih menjadi permasalahan bagi tiap-tiap negara dalam mewujudkan pembangunan ekonomi. Kemiskinan akan memberikan dampak yang buruk dalam keberlangsungan pertumbuhan ekonomi terutama dalam produksi dan perluasan lapangan pekerjaan [5]. Dengan tingginya angka kemiskinan peningkatan kuantitas produksi baik barang atau jasa akan terhambat. Sehingga upaya penurunan kemiskinan harus terus dilakukan secara komprehensif melalui berbagai langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan melalui upaya peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan masyarakat, pengentasan

pengangguran, penekanan laju inflasi maupun pada peningkatan upah minimum guna menjaga stabilitas perkembangan kemiskinan dalam kapasitas yang lebih baik [6].

Indonesia merupakan negara berkembang yang tidak terlepas dalam menghadapi permasalahan kemiskinan. Terjadinya ketimpangan pembangunan maupun kebijakan pemerintah menjadi faktor utama yang menyebabkan pembangunan tidak efektif maupun tepat guna dalam menjangkau lapisan masyarakat [7]. Akibatnya dampak pembangunan tidak dapat dirasakan oleh sepenuhnya bagi seluruh lapisan masyarakat [8]. Guna memperjelas gambaran tingkat kemiskinan di Indonesia berikut disajikan Gambar perkembangan tingkat kemiskinan Indonesia tahun 2018-2021.



Gambar 1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Indonesia 2018-2021

Berdasarkan perkembangan tingkat kemiskinan selama 2018-2021 Indonesia masih memiliki perkembangan yang fluktuatif setiap tahunnya dengan mengalami peningkatan secara signifikan selama 2 tahun terakhir. Tingkat presentase kemiskinan di Indonesia belum dapat mempertahankan pada posisi yang rendah pada 1 digit. Hanya beberapa periode Indonesia mampu menurunkan tingkat kemiskinan di bawah 2 digit akan tetapi tidak bertahan lama kemudian kembali mengalami peningkatan yang signifikan

diatas 1 digit. Distribusi tingkat kemiskinan di Indonesia didominasi pada daerah perdesaan sebesar 12,53% jika dibanding dengan daerah perkotaan sebesar 7,6%. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan dan distribusi faktor ekonomi menjadi permasalahan utama dalam mengentaskan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Terdapat berbagai faktor yang dapat digunakan dalam mengentaskan kemiskinan salah satunya melalui langkah awal dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat bersaing dalam meningkatkan ekonomi dari lini terkecil yaitu dirinya sendiri. Melalui pendidikan tingkat kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan. Pendidikan akan memberikan fasilitas agar masyarakat mendapatkan pengetahuan dan modal dalam peningkatan hasil produksi barang maupun jasa. Dengan seiringnya peningkatan hasil produksi barang atau jasa maka secara tidak langsung akan membuka berbagai macam lapangan pekerjaan yang akan menyerap tingkat pengangguran. Akibatnya masyarakat akan mendapatkan penghasilan sebagai modal dalam mengejar ketimpangan sosial ekonomi untuk memperbaiki kualitas hidup baik dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak [9].

Kesehatan merupakan salah satu faktor fundamental yang berkaitan dengan jumlah produktifitas barang dan jasa. Kualitas kesehatan yang buruk akan memberikan hambatan terhadap capaian produktivitas. Sebab, kesehatan menjadi aset penting yang berperan sebagai investor dalam menunjang pembangunan sumber daya manusia dalam memperkuat peningkatan hasil produksi barang dan jasa. Sehingga kesehatan akan berkorelasi secara langsung dalam mendukung produktivitas sumber daya manusia untuk membawa perubahan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan [10].

Pemerintah juga memegang peranan terpenting dalam pengentasan kemiskinan melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan.

Salah satunya yaitu kebijakan pemerintah dalam menghadapi laju inflasi. Inflasi akan memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui kenaikan biaya produksi barang dan jasa [11]. Dengan kenaikan barang dan jasa inilah yang menyebabkan tingkat kesenjangan antara pendapatan dan standar harga pemenuhan kebutuhan semakin sulit untuk dijangkau. Sehingga hal ini menempatkan faktor upah minimum sebagai kebijakan dari pemerintah untuk menghadapi meningkatnya perkembangan kemiskinan dari adanya laju inflasi. Adanya upah minimum akan memberikan bantuan terhadap kepastian pendapatan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan [12].

Berdasarkan pemaparan permasalahan kemiskinan di Indonesia. Penelitian kemiskinan memiliki urgensi yang harus dilakukan. Hal tersebut disebabkan permasalahan kemiskinan masih menjadi faktor utama dalam menghambat pembangunan ekonomi di Indonesia. Pengungkapan faktor-faktor penentu tingkat kemiskinan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak dalam memberikan upaya dalam mengatasi permasalahan kemiskinan terutama pemerintah dalam mengambil kebijakan. Penelitian terkait kemiskinan pernah dilakukan oleh [1]; [13]; [14]; [15]. Pengungkapan faktor-faktor penentu tingkat kemiskinan pada penelitian yang telah dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu variabel faktor penentu tingkat kemiskinan diketahui secara global. Berdasarkan kondisi wilayah atau letak geografis penelitian yang berbeda-beda, penetapan hasil global tidak akan dapat menjawab permasalahan dalam mengungkapkan penentuan faktor yang mempengaruhi terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut disebabkan adanya kondisi wilayah yang berbeda maka variabel yang menentukan tingkat kemiskinan juga akan berbeda. Dalam penelitian ini pengungkapan analisis faktor tingkat kemiskinan akan dilakukan secara spasial dengan menggunakan pendekatan regresi spasial untuk

memperoleh signifikansi variabel penentu tingkat kemiskinan pada tiap-tiap provinsi di Indonesia. Sehingga, hasil penelitian akan lebih bermanfaat dalam menentukan kebijakan pengentasan kemiskinan dengan fokus pada masing-masing wilayah untuk mendapatkan kebijakan yang tepat guna, efektif dan efisien. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui model tingkat kemiskinan serta mengungkapkan variabel faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan pada masing masing wilayah di 34 provinsi Indonesia.

Kajian Literatur Kemiskinan

Kemiskinan merupakan keterbatasan kondisi seseorang terhadap kepemilikan finansial yang menghambat dalam proses pemenuhan kebutuhan standar hidup. Masyarakat yang tergolong dalam kondisi garis kemiskinan tidak mampu dalam mencapai kehidupan yang layak untuk mendapatkan kesehatan, pendidikan, kualitas pangan serta lingkup sosial yang baik. Terdapat dua klasifikasi tingkat kemiskinan berdasarkan pengertiannya. Pertama kemiskinan yang bersifat absolute dimana masyarakat yang berada pada garis kemiskinan ini merupakan masyarakat yang benar-benar tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan yang cukup, tempat tinggal yang layak maupun berbagai akses sosial dasar lainnya. Sedangkan kelompok masyarakat miskin yang kedua disebut sebagai garis kemiskinan relatif. Masyarakat yang berada pada garis kemiskinan relatif umumnya mereka telah mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makanan yang cukup, tempat tinggal yang layak, maupun dalam mengakses kebutuhan sosial seperti pendidikan maupun kesehatan. Hanya saja pada garis kemiskinan relatif mereka dapat memenuhi kecukupan tersebut masih berada pada garis standar kelayakan hidup pada lingkungan sekitarnya [16]. Adanya permasalahan kemiskinan disebabkan oleh berbagai hal seperti tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, sulitnya menjangkau sarana pendidikan dan

kesehatan, kurangnya produktifitas masyarakat maupun kondisi sosial lingkungan masyarakat yang jauh dari taraf hidup sejahtera [11].

Pendidikan

Pendidikan merupakan proses dalam upaya peningkatan seseorang dalam meningkatkan kualitas sumber daya melalui pengajaran maupun pelatihan. Pendidikan dapat membentuk pribadi seseorang dalam meningkatkan kecerdasan berfikir maupun keterampilan yang dibutuhkan dalam hidup sosial masyarakat. Pendidikan akan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pembangunan manusia pada suatu negara. Dengan tercapainya tingkat pendidikan yang baik pada masyarakat, dapat membawa langkah baik dalam pembangunan ekonomi suatu negara [17].

Pendidikan berkaitan dengan tingkat kemiskinan melalui hubungan pendidikan sebagai investasi dalam peningkatan sumber daya manusia. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang baik, mereka akan lebih mudah dalam mengatasi ketimpangan kondisi sosial ekonomi dalam masyarakat. Dengan pemikiran cerdas dan keterampilan yang dimiliki melalui tingkat pendidikan, masyarakat akan lebih produktif sehingga dapat memperoleh sumber pendapatan yang baik guna meningkatkan taraf hidupnya. Masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan baik maka akan memiliki akses yang lebih mudah dalam memperoleh kualitas kesehatan sehingga tingkat kesehatan dapat ditingkatkan [18].

Penelitian terkait dengan pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan pernah dilakukan oleh [18]; [19]; [17]. Hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat adanya pengaruh antara tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil tersebut digunakan sebagai acuan hipotesis dalam pendidikan terhadap kemiskinan dalam penelitian ini melalui H1 yakni tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di seluruh provinsi di Indonesia.

Pengangguran

Pengangguran merupakan kondisi masyarakat yang telah memasuki usia angkatan kerja namun belum memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran juga dapat diartikan sebagai seseorang yang telah mendapatkan pekerjaan atau memiliki rencana usaha akan tetapi belum melakukan pekerjaan tersebut. Pengangguran menjadi permasalahan ekonomi terutama permasalahan nasional yang menyebabkan tingkat perkembangan ekonomi negara menjadi lambat [20].

Pengangguran dalam kondisi sosial ekonomi memiliki korelasi secara langsung dengan tingkat kemiskinan baik dari sisi konsumsi maupun tingkat pendapatan. Dari sisi konsumsi pengangguran menyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan sebab konsumsi yang dapat dilakukan akan semakin terbatas dibawah standar konsumsi lingkungan masyarakat. Dari segi pendapatan pengangguran secara otomatis tidak akan memiliki *income* atau pendapatan untuk memenuhi kebutuhan standar hidupnya. Sehingga keberlangsungan tingginya pengangguran akan menyebabkan peningkatan jumlah kemiskinan [19].

Penelitian dari [19]; [20]; [5] yang melakukan penelitian faktor pengangguran pada tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa tingkat pengangguran memberikan pengaruh pada peningkatan kemiskinan. Sehingga berdasarkan penelitian yang telah dilakukan hipotesis kedua (H2) dari pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan adalah terdapat pengaruh yang signifikan dari adanya pengangguran terhadap perkembangan tingkat kemiskinan pada 34 provinsi di Indonesia.

Inflasi

Inflasi merupakan bagian dari fenomena perubahan kualitas ekonomi yang ditandai dengan naiknya tingkat harga barang secara signifikan. Terjadinya inflasi tidak akan memiliki kesamaan pada setiap negara bahkan wilayah. Begitu juga pada keseluruhan 34 provinsi di Indonesia, inflasi yang terjadi pada setiap periodenya tidak akan sama. Inflasi yang

berlangsung dalam jangka panjang dapat menyebabkan meningkatkan nilai harga seluruh barang secara terus menerus yang dapat mengakibatkan semakin jauhnya kesenjangan sosial ekonomi pada masyarakat [11].

Perkembangan pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan dihubungkan melalui permintaan barang produksi yang dilakukan. Semakin tingginya harga barang hal tersebut akan mengurangi tingkat produksi dalam negeri. Masyarakat akan cenderung memilih harga barang yang lebih murah hasil impor yang dilakukan. Hal ini menyebabkan tingkat konsumsi produksi barang dan jasa dalam negeri menurun. Sehingga pendapatan yang diperoleh juga ikut menurun. Hal inilah yang menyebabkan peningkatan inflasi dalam jangka panjang akan meningkatkan jumlah kemiskinan [21].

Penelitian yang dilakukan oleh [21]; [21]; [11] yang berkaitan dengan hubungan antara laju inflasi dengan tingkat kemiskinan menghasilkan temuan bahwa inflasi yang terjadi memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. sehingga berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tersebut hipotesis ke tiga (H3) yang dibentuk adalah adanya pengaruh yang signifikan pada 34 provinsi di Indonesia dari laju inflasi dengan tingkat kemiskinan.

Upah Minimum

Upah minimum merupakan penetapan minimal upah yang harus diberikan oleh perusahaan dalam suatu wilayah. Penetapan upah minimum pada setiap daerah memiliki perbedaan. Penetapan upah minimum dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan standar kesejahteraan pada masyarakat. Dengan adanya penetapan upah minimum diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari [6].

Hubungan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan didasarkan pada asumsi sesuai tidaknya jumlah upah minimum yang ditetapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL). Ketidak sesuaian standar upah minimum yang ditetapkan secara langsung akan

berdampak pada kurangnya pendapatan masyarakat dalam memenuhi standar hidup yang layak sehingga hal ini akan menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan. Sehingga penetapan upah minimum yang cukup akan mendasari perkembangan dalam pencapaian program pengentasan kemiskinan [22].

Penelitian terkait dengan penetapan upah minimum dengan tingkat kemiskinan pernah dilakukan oleh [22]; [6]; [22]. Hasil dari penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penetapan upah minimum pada tiap-tiap wilayah memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Sehingga hipotesis ke empat (H4) dari penelitian ini dinyatakan bahwa penetapan upah minimum yang dalam hal ini adalah upah minimum provinsi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di seluruh provinsi di Indonesia.

Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor terpenting dalam suatu negara untuk mensukseskan tingkat pembangunan ekonomi. Pengembangan kesehatan akan turut menjadi pendamping dalam upaya pemerintah mewujudkan pembangunan ekonomi yang optimal. Pembangunan kesehatan merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan berdasarkan standar minimum kesehatan [23]. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan taraf kualitas hidup masyarakat untuk mencapai produktifitas kerja yang lebih baik. Dengan kepemilikan tingkat kesehatan yang baik maka masyarakat akan lebih baik dalam meningkatkan produksi barang dan jasa yang membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Tingkat kesehatan memiliki hubungan terhadap kemiskinan melalui kualitas hidup masyarakat dalam membantu peningkatan produktivitas. Kesehatan berkedudukan sebagai investor terhadap penekanan laju kemiskinan. Tingkat kesehatan yang dapat diwujudkan dalam masyarakat miskin akan dapat membantu dalam peningkatan kualitas kerja sehingga pendapatan

yang didapat akan terus meningkat. Peningkatan pendapatan atas peningkatan kualitas kerja inilah yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan pada masyarakat, sebab masyarakat dengan pendapatan yang diperoleh dari produktifitasnya akan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya [24].

Pengembangan hipotesis dalam pengaruh tingkat kesehatan terhadap kemiskinan didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh [24]; [23]; [10]. Pada penelitian yang telah dilakukan terdapat pengaruh antara tingkat kesehatan terhadap tingkat kemiskinan. Oleh sebab itu, hipotesis dalam hubungan variabel pengaruh kesehatan terhadap tingkat kemiskinan dinyatakan dalam H5 dengan asumsi bahwa tingkat kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan diseluruh provinsi di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Penggunaan penelitian asosiatif dimaksudkan untuk mengetahui terkait dengan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan variabel yang digunakan yaitu:

- X₁ = Pendidikan
- X₂ = Pengangguran
- X₃ = Inflasi
- X₄ = Upah Minimum
- X₅ = Kesehatan
- Y = Kemiskinan

Data yang peneliti gunakan dalam analisis penentuan faktor kemiskinan bersumber dari data skunder yang di terbitkan oleh BPS Indonesia tahun 2021 dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Populasi dari penelitian ini merupakan seluruh data kemiskinan, pendidikan, pengangguran, inflasi, upah minimum dan kesehatan dengan jumlah sebanyak 34 provinsi. Teknik sampling yang peneliti gunakan dalam pemilihan sampel adalah sampling jenuh yang

menggunakan seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Data dianalisis menggunakan teknik analisis analisis regresi sepasial dengan menggunakan aplikasi GWR4 dan SPSS 16.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian regresi dengan menggunakan model GWR (*Geographically Weidhted Regrression*) langkah awal yang perlu dilakukan adalah menentukan model GWR yang dilihat dengan fungsi kernel serta kebaikan model yang dibentuk. Terdapat empat jenis pembobot dalam analisis GWR yang dapat digunakan yaitu fungsi kernel dengan model *fixed gaussian*, *fixed bisquare*, *adabtive gaussian*, dan *adabtive bisquare*. Dari ke empat fungsi kernel tersebut akan dipilih salah satu berdasarkan model yang paling baik dengan membandingkan nilai AIC, AICc, BIC yang paling kecil serta kebaikan model (R^2) yang paling besar [25]. Berikut tabel hasil perbandingan fungsi kernel dari analisis GWR:

Tabel 1. Perbandingan Fungsi Kernel

Fungsi Kernel	Ukuran Kebaikan Model			
	AIC	AICc	BIC	R^2
Fixed Gaussian	-	-	-	-
Fixed Bisquare	-	-	-	-
Adabtive Gaussian	871,483	876,700	885,157	0,685
Adabtive Bisquare	867,669	879,008	884,068	0,841

Sumber: GWR4 (data diolah)

Berdasarkan nilai perbandingan AIC, AICc, BIC dan R^2 pada masing masing fungsi kernel, dapat diketahui bahwa fungsi kernel *adabtive bisquare* merupakan fungsi kernel yang memiliki model paling baik. Hal tersebut dilihat berdasarkan perbandingan ukuran kebaikan modelnya, pada fungsi pembobot *adabtive bisquare* memiliki dominasi terbaik pada ukuran kebaikan model yakni memiliki nilai AIC, BIC terkecil dan R^2 paling besar. Nilai AIC yang

dibentuk sebesar 867,669, nilai BIC sebesar 884,068 dan nilai R^2 sebesar 0,841 atau sebesar 84,1%. Sehingga berdasarkan perbandingan fungsi kernel dengan melihat ukuran kebaikan model yang dibentuk maka fungsi kernel *adabtive bisquare* dipilih sebagai model yang digunakan untuk menentukan model tingkat kemiskinan pada 34 provinsi di Indonesia.

Hasil uji penentuan model pembobot selanjutnya digunakan untuk analisis lebih lanjut dalam mengetahui apakah pada model regresi linier berganda memiliki persamaan dengan model regresi spasial.

Tabel 2. Pengujian Kesesuaian Model GWR

Sumber	Nilai
F-hitung	3,4576
df1	4,552
df2	23,448
F-tabel	2,796

Sumber: GWR4 (data diolah)

Dapat diketahui pada Tabel 2 bahwa model regresi spasial memiliki nilai F hitung sebesar 3,4576 dengan nilai F tabel sebesar 2,796, berdasarkan nilai tersebut nilai F hitung lebih besar jika dibandingkan dengan nilai F tabel. Sehingga dapat diputuskan bahwa model regresi spasial tidak memiliki persamaan terhadap model regresi linier berganda. Artinya terdapat perbedaan variabel yang mempengaruhi secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada 34 provinsi di Indonesia. Selain itu berdasarkan pengujian kesesuaian model ini juga dapat ditunjukkan bahwa koefisien regresi pada masing-masing wilayah memiliki estimasi yang berbeda-beda. Berikut Tabel 3 menunjukkan estimasi koefisien regresi spasial serta variabel yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan yang dibentuk pada masing-masing wilayah provinsi.

Berdasarkan nilai estimasi parameter koefisien regresi yang dibentuk pada Tabel 3 menunjukkan nilai koefisien yang berbeda-beda pada setiap wilayah. Perbedaan nilai koefisien yang dibentuk ini menunjukkan bahwa pada

setiap provinsi di Indonesia ukuran pengaruh yang diberikan pada setiap variabel independen terhadap tingkat kemiskinan di masing-masing wilayah pengukuran juga berbeda. Seperti halnya pada wilayah provinsi Papua dan Papua Barat, walaupun arah koefisien yang dibentuk sama akan tetapi nilai koefisien yang dibentuk seluruhnya berbeda. Sebagai contoh untuk gambaran lebih jelas, pada peningkatan 1 satuan pada variabel pengangguran di provinsi Papua Barat akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 33,002 sedangkan pada provinsi Papua atas peningkatan 1 satuan dari pengangguran dapat meningkatkan tingkat kemiskinan yang lebih besar yaitu sebesar 33,636. Contoh yang lain dapat dilihat pada provinsi Bali dan NTB, pada kedua provinsi tersebut juga memiliki arah koefisien yang sama yaitu positif. Pada provinsi Bali setiap peningkatan 1 satuan kesehatan akan menaikkan tingkat kemiskinan sebesar 238,646 sedangkan pada provinsi NTB sebesar 15,55. Hal ini juga berlaku pada seluruh wilayah provinsi sebab nilai koefisien estimasi parameter yang dihasilkan berbeda-beda.

Perbedaan tidak hanya terbentuk pada estimasi koefisien parameter yang dibentuk, berdasarkan perbandingan nilai t tabel dengan nilai t hitung didapatkan perbedaan pengaruh yang signifikan pada variabel independen terhadap tingkat kemiskinan di seluruh wilayah provinsi. Perbedaan tersebut dapat diketahui berdasarkan nilai estimasi parameter koefisien regresi yang telah tercetak tebal. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pengukuran memiliki nilai t hitung yang lebih besar jika dibandingkan dengan nilai t tabel. Pada 34 provinsi yang telah diukur pada masing-masing wilayah memiliki tingkat pengaruh variabel independen secara signifikan yang berbeda-beda. Sebagai contoh dapat dilihat provinsi Kalimantan Timur dengan Kalimantan Utara. Pada provinsi Kalimantan Timur variabel yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan adalah variabel pengangguran, inflasi, upah minimum dan kesehatan sedangkan

pada provinsi Kalimantan Utara hanya pengangguran yang memiliki pengaruh secara signifikan pada tingkat kemiskinan.

Tabel 3. Estimasi Parameter Model Spasial

Provinsi	β_0	β_1	β_2	β_3	β_4	β_5
Aceh	93962,37	-14,903	23,016	-195,339	-1,091	17,966
Sumatera Utara	56655,13	-14,899	24,791	-193,09	-1,286	17,734
Sumatera Barat	70642,73	-14,913	25,054	-192,214	-1,418	17,349
Riau	35222,18	-14,911	25,603	-191,578	-1,462	17,328
Jambi	63019,45	-14,919	25,718	-191,121	-1,534	17,112
Sumatera Selatan	92007,03	-0,015	157,070	-521,302	-30,217	243,549
Bengkulu	67701,83	-14,927	25,431	-191,206	-1,558	16,964
Lampung	63720,06	-14,937	26,589	-189,384	-1,745	16,6069
K. Bangka Belitung	6459,79	-14,933	27,169	-188,8	-1,775	16,639
K. Riau	17514,4	-14,918	28,446	-187,846	-1,775	16,927
DKI Jakarta	-30997	0,029	157,356	-522,069	-30,073	245,568
J. Barat	307379	0,0276	157,341	-521,573	-30,075	245,447
J. Tengah	171877,2	-14,938	28,586	-186,976	-1,924	16,4609
DI Yogyakarta	11940,6	-14,958	27,977	-186,961	-2,021	16,013
Jawa Timur	67815,35	-14,962	28,547	-186,179	-2,09	15,912
Banten	138634,4	-14,944	26,637	-189,07	-1,803	16,431
Bali	103062,6	-0,103	156,522	-511,2	-30,419	238,646
NTB	42825,18	-14,977	29,765	-184,29	-2,281	15,550
NTT	77302,98	-14,987	30,565	-183,122	-2,39	15,362
Kalimantan Barat	54827,04	-14,941	29,012	-186,391	-1,975	16,383
Kalimantan Tengah	53896,02	-14,950	29,392	-185,636	-2,066	16,164
Kalimantan Selatan	32349,58	-14,959	29,739	-184,94	-2,151	15,960
Kalimantan Timur	30073,84	0,0647	157,574	-519,011	-29,925	246,856
Kalimantan Utara	131742,5	-14,955	30,257	-184,565	-2,147	16,081
Sulawesi Utara	-16041	-14,978	31,799	-182,213	-2,376	15,648
Sulawesi Tengah	73226,86	-14,974	31,189	-182,934	-2,327	15,685
Sulawesi Selatan	63053,14	-14,974	30,722	-183,395	-2,307	15,657
Sulawesi Tenggara	69661,46	0,0346	157,338	-514,583	-29,995	245,117
Gorontalo	73578,91	-14,973	31,541	-182,625	-2,334	15,731
Sulawesi Barat	2413,792	-14,970	30,639	-183,613	-2,276	15,738
Maluku	-9320,3	-15,001	32,468	-180,787	-2,556	15,201
Maluku Utara	22053,47	-14,988	32,473	-181,254	-2,462	15,501
Papua Barat	46857,95	-15,006	33,002	-180,139	-2,601	15,156
Papua	72350,64	-15,017	33,636	-179,226	-2,684	15,011

Keterangan

Nilai estimasi parameter yang dicetak **tebal** merupakan nilai estimasi variabel yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan yang telah ditentukan berdasarkan perbandingan antara nilai t hitung setiap variabel pada masing-masing wilayah dengan nilai t tabel

Sumber: GWR4 (data diolah)

Tabel 4. Pembentukan Model Regresi Spasial

Provinsi	Model Regresi Berdasarkan Variabel Yang Signifikan
Aceh	$Y = 93962,37 - 195,339X_3 + 17,96591X_5$
Sumatera Utara	$Y = 56655,13 - 14,899X_1 - 193,09X_3$
Sumatera Barat	$Y = 70642,73 - 192,214X_3$
Riau	$Y = 35222,18 + 17,328X_5$
Jambi	-
Sumatera Selatan	$Y = 92007,03 + 157,070X_2 - 521,302X_3 - 30,217X_4 + 243,549X_5$
Bengkulu	$Y = 67701,83 + 25,431X_2 - 1,558X_4$
Lampung	$Y = 63720,06 - 1,745X_4$
K. Bangka Belitung	$Y = 6459,79 - 14,933X_1 - 188,8X_3$
K. Riau	-
DKI Jakarta	$Y = -30997 + 157,356X_2 - 522,069X_3 - 30,073X_4 + 245,568X_5$
J. Barat	$Y = 307379 + 157,341X_2 - 521,573X_3 - 30,075X_4 + 245,447X_5$
J. Tengah	$Y = 171877,2 - 186,976X_3$
DI Yogyakarta	$Y = 11940,6 - 14,958X_1$
Jawa Timur	$Y = 67815,35 - 14,962X_1$
Banten	-
Bali	$Y = 103062,6 + 156,522X_2 - 511,2X_3 - 30,419X_4 + 238,646X_5$
NTB	$Y = 42825,18 - 14,977X_1$
NTT	$Y = 77302,98 - 14,987X_1$
Kalimantan Barat	-
Kalimantan Tengah	$Y = 53896,02 - 14,950X_1$
Kalimantan Selatan	$Y = 32349,58 - 14,959X_1$
Kalimantan Timur	$Y = 30073,84 + 157,574X_2 - 519,011X_3 - 29,925X_4 + 246,856X_5$
Kalimantan Utara	$Y = 131742,5 - 14,955 X_1$
Sulawesi Utara	$Y = -16041 - 14,978 X_1$
Sulawesi Tengah	$Y = 73226,86 - 14,974 X_1$
Sulawesi Selatan	$Y = 63053,14 - 14,974 X_1$
Sulawesi Tenggara	$Y = 69661,46 + 157,338X_2 - 514,583X_3 - 29,995X_4 + 245,117X_5$
Gorontalo	$Y = 73578,91 - 14,973X_1 - 182,625X_3$
Sulawesi Barat	$Y = 2413,792 - 14,970X_1 - 183,613X_3 + 15,738X_5$
Maluku	$Y = -9320,3 - 15,001X_1$
Maluku Utara	$Y = 22053,47 - 14,988X_1 + 15,501X_5$
Papua Barat	$Y = 46857,95 - 15,006X_1$
Papua	$Y = 72350,64 - 15,017X_1 + 33,636X_2$
Keterangan	Provinsi yang tidak memiliki model menandakan diantara variabel independen tidak ada yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan

Sumber: GWR4 (data diolah)

Berdasarkan model tingkat kemiskinan yang dibentuk pada Tabel 4, diperoleh hasil bahwa pengaruh variabel independen yang dilihat dari arah koefisien memiliki kecenderungan yang berbeda beda. Pertama pada variabel pendidikan memiliki arah koefisien negatif yang menunjukkan bahwa variabel pendidikan memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kedua dapat diketahui dari model yang dibentuk tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif yang signifikan pada tingkat kemiskinan yang menandakan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran maka kemiskinan akan semakin meningkat. Ketiga pada variabel inflasi yang memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Adapun variabel yang ke empat yaitu upah minimum memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Serta variabel yang terakhir yaitu kesehatan akan memberikan tingkat pengaruh positif yang signifikan terhadap kemiskinan. Berdasarkan perbedaan variabel yang signifikan dari tiap tiap provinsi hal ini menunjukkan bahwa pada setiap daerah memiliki faktor yang berbeda-beda dalam memodelkan tingkat kemiskinan serta pengaruh yang berbeda-beda pula. Dari hasil analisis yang telah dilakukan berdasarkan variabel yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan dapat dikelompokkan pada Tabel 5.

Dari hasil pengelompokan provinsi yang memiliki tingkat signifikansi variabel yang sama maka dapat diketahui bahwa pada keseluruhan wilayah akan terdapat 10 kelompok. Kelompok pertama yaitu terdiri dari provinsi Aceh dan Sulawesi Barat dengan variabel yang berpengaruh adalah inflasi dan kesehatan. Kelompok kedua yang memiliki kesamaan variabel pendidikan dan inflasi yaitu provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung dan Gorontalo. Kelompok yang ketiga hanya terdapat satu variabel yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan yaitu inflasi terdapat pada provinsi Sumatera Barat dan

Jawa Tengah. Kelompok keempat dengan variabel kesehatan yang terdapat pada provinsi Riau.

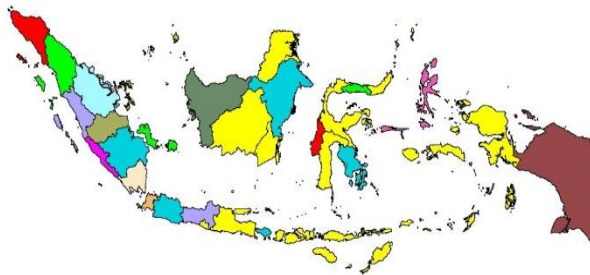
Kelompok	Variabel	Provinsi
1	Inflasi (X ₃) Kesehatan (X ₅)	Aceh dan Sulawesi Barat
2	Pendidikan (X ₁) Inflasi (X ₃)	Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, dan Gorontalo
3	Inflasi (X ₃)	Sumatera Barat dan Jawa Tengah
4	Kesehatan (X ₅)	Riau
5	Pengangguran (X ₂) Inflasi (X ₃) Upah Minimum (X ₄) Kesehatan (X ₅)	Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara
6	Pengangguran (X ₂) Upah Minimum (X ₄)	Bengkulu
7	Upah Minimum (X ₄)	Lampung
8	Pendidikan (X ₁)	DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Barat
9	Pendidikan (X ₁) Kesehatan (X ₅)	Maluku Utara
10	Pendidikan (X ₁) Pengangguran (X ₂),	Papua

Tabel 5. Pengelompokan Provinsi Berdasarkan Signifikansi Variabel Dependen

Sumber: GWR4 (data diolah)

Kelompok kelima yang terdiri dari provinsi Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara dengan variabel yang signifikan adalah pengangguran, inflasi, upah minimum dan kesehatan. Kelompok keenam terdiri dari satu provinsi yaitu Bengkulu dengan variabel yang signifikan adalah pengangguran dan upah minimum. Kelompok ketujuh yaitu provinsi

Lampung dengan variabel yang signifikan adalah upah minimum. Kelompok 8 merupakan kelompok dengan anggota paling banyak yaitu terdiri dari provinsi DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua Barat dengan variabel yang berpengaruh secara signifikan adalah tingkat pendidikan. Sedangkan pada kelompok sembilan dan kelompok 10 hanya terdiri dari satu provinsi yaitu provinsi Maluku Utara dan Papua dengan variabel yang signifikan secara berturut turut adalah pendidikan dan kesehatan dengan pendidikan dan pengangguran.



Gambar1. Peta *Clustering* Provinsi Yang Memiliki Variabel Signifikan Sama

Hasil analisis peta *clustering* pengelompokan wilayah berdasarkan variabel yang memiliki signifikansi sama pada Gambar 1. Diperoleh hasil bahwa pada 34 provinsi di Indonesia memiliki sebaran variabel yang memiliki pengaruh signifikansi sama terbagi ke dalam 10 *cluster*, dengan rata-rata provinsi wilayah timur Indonesia memiliki kecenderungan variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan yang sama. Pada provinsi di bagian wilayah timur Indonesia, secara dominan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang ditunjukkan oleh warna wilayah berwarna kuning. Hal tersebut menunjukkan bahwa letak geografis memberikan pengaruh terhadap pemodelan tingkat kemiskinan di

Indonesia. Sehingga hal ini juga membuktikan bahwa penggunaan analisis regresi spasial dalam mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan di Indonesia merupakan metode yang tepat. Sebab kondisi wilayah yang berbeda-beda pada tiap-tiap provinsi akan menunjukkan faktor permasalahan yang berbeda pula. Selain itu, pada setiap wilayah juga akan memiliki tingkat kualitas atau kuantitas pembangunan yang berbeda sehingga hasil yang diperoleh juga akan berbeda.

Pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan

Pendidikan memberikan pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang dapat ditempuh oleh masyarakat maka tingkat kemiskinan akan semakin menurun. Tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan disebabkan oleh kualitas sumber daya yang dihasilkan. Keberhasilan pendidikan dalam mendukung perbaikan terhadap tingkat kualitas sumber daya akan dapat meningkatkan produktivitas baik barang maupun jasa. Dengan semakin tingginya produktivitas yang dapat dicapai maka dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap tingkat pengangguran yang berakibat turunya tingkat kemiskinan. Sebab tingkat kemiskinan sendiri akan semakin menurun apabila masing masing individu dapat meningkatkan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hasil penelitian ini telah sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh [17] yang menghasilkan pada temuan penelitiannya bahwa pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Bersama dengan penelitiannya dijelaskan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan melalui peningkatan pendidikan kepala rumah tangga sebagai penghasil pendapatan utama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pengaruh Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis didapatkan hasil bahwa pengangguran memberikan arah perkembangan positif terhadap tingkat kemiskinan. Artinya adanya peningkatan pengangguran sejalan dengan peningkatan kemiskinan. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya pengangguran akan menyebabkan hilangnya pendapatan masyarakat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan standar hidup yang layak. Kebutuhan masyarakat yang beragam akan semakin memberikan kesenjangan dengan penghasilan yang didapat apabila masyarakat tidak bekerja. Sehingga dengan semakin jauhnya tingkat kesenjangan maka secara otomatis masyarakat akan menurunkan tingkat konsumsi kebutuhannya. Kondisi inilah yang menyebabkan tingkat kemiskinan akan meningkat, sebab masyarakat akan semakin tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh [19] yang menjelaskan bahwa pengangguran merupakan permasalahan utama dalam menunjang pembangunan ekonomi sebuah negara, sebab dengan tingginya angka pengangguran akan menurunkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya masyarakat akan masuk dalam lingkup garis kemiskinan yang jangka panjangnya akan terus mempengaruhi penurunan tingkat konsumsi nasional.

Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan

Inflasi berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa memberikan pengaruh negatif dan signifikan pada peningkatan kemiskinan. Berdasarkan hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa kenaikan inflasi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hasil ini dapat dijelaskan melalui perbedaan periode pengukuran. Berdasarkan periode pengukuran selama tahun 2021 yang merupakan periode jangka pendek, dapat menjelaskan bahwa dengan adanya kenaikan

inflasi akan mengakibatkan penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini telah sesuai bahwa kenaikan inflasi akan memberikan dampak pada kenaikan barang sehingga tingkat konsumsi masyarakat akan meningkat yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan ikut meningkat. Peningkatan inilah yang menyebabkan adanya kenaikan tingkat kemiskinan akan menurun sebab tingkat konsumsi yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya ikut meningkat. Penelitian ini telah sesuai dengan teori Keynes bahwa inflasi akan menyebabkan jumlah permintaan pasar yang lebih besar sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan dalam jangka pendek dan didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh [21] yang menghasilkan bahwa tingkat inflasi memberikan pengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Pengaruh Upah Minimum terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Upah minimum merupakan penetapan minimal upah yang telah ditetapkan pada tiap-tiap daerah. Upah minimum memberikan pengaruh yang negatif, hal tersebut menandakan bahwa setiap kenaikan upah minimum pada setiap provinsi akan menurunkan tingkat kemiskinan daerah. Tingkat upah minimum akan memberikan pengaruh terhadap tingkat kemiskinan melalui kepastian pendapatan yang akan diperoleh rumah tangga. Sehingga berdasarkan kepastian yang dapat diperoleh maka setiap rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa upah minimum akan memberikan kepastian pendapatan bagi rumah tangga yang memberikan dampak pada terpenuhinya kebutuhan rumah tangga sehingga tingkat kemiskinan dapat diturunkan. Penelitian ini telah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh [22] yang

menghasilkan temuan bahwa penetapan upah minimum dapat memberikan dampak peningkatan dari pengentasan ketidakmampuan ataupun kekurangan rumah tangga, akibatnya adanya peraturan penetapan upah minimum bagi perusahaan dapat mengurangi kesenjangan antara kebutuhan rumah tangga dengan pendapatan yang dihasilkan.

Pengaruh Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan

Dari hasil penelitian tingkat kesehatan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa tingginya angka penduduk yang memiliki permasalahan kesehatan akan meningkatkan tingkat kemiskinan pada masyarakat. Tingkat kesehatan memberikan berbagai masalah bagi para masyarakat, dengan tingginya masyarakat yang memiliki kualitas kesehatan rendah masa secara langsung memberikan korelasi yang berarti terhadap tingkat produktivitas barang dan jasa. Sebab manusia menjadi objek utama dalam peningkatan produksi barang maupun jasa. Dengan semakin rendahnya kualitas kesehatan yang dimiliki, masyarakat secara umum tidak mampu dalam menghasilkan pendapatan untuk memenuhi tingkat konsumsi sehari-hari mereka. Sehingga dengan hal ini apabila tingkat permasalahan kesehatan tinggi maka tingkat kemiskinan akan mengalami peningkatan yang sejalan. Penelitian ini telah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh [10] yang menyebutkan bahwa kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. penelitian tersebut menjelaskan bahwa kesehatan merupakan faktor utama dalam mewujudkan kemakmuran maupun kesejahteraan untuk memenuhi tingkat kebutuhan dasar yang dibutuhkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor pendidikan, pengangguran, inflasi, upah

minimum dan kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan model tingkat kemiskinan yang berbeda-beda pada setiap provinsinya. Berdasarkan hasil temuan ini dalam mengentaskan kemiskinan dapat dilakukan berbagai upaya yang diantaranya melalui peningkatan kualitas pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya profesional sehingga tingkat pengangguran yang menjadi permasalahan dapat dituntaskan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan seiring berkembangnya pendapatan masyarakat, maka dapat digunakan dalam mewujudkan pengentasan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat baik dari segi kesehatan, pendidikan, konsumsi serta kebutuhan lainnya.

Faktor pengaruh tingkat kemiskinan di Indonesia dapat di kelompokkan menjadi 10 *cluster* berdasarkan variabel yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan 10 *cluster* tersebut dapat dibedakan dengan jelas variabel mana saja yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan masing-masing wilayah sesuai dengan prioritasnya agar kebijakan yang dikeluarkan dapat tepat guna, lebih efektif dan efisien dalam menjangkau permasalahan yang ada.

5. REFERENSI

- [1] D. Cahya and N. Triana, "Analisis Faktor-Faktor Pembentuk Kemiskinan Pulau Jawa Periode 2013-2021 Analysis Of Factors For Poverty Island Java 2013-2021 Period," vol. 22, no. 1, pp. 132-145, 2022.
- [2] M. A. Okuputra and Nasikh, "Pengaruh Inovasi Daerah Terhadap Kemiskinan," *Inov. J. Ekon. Keuang. dan Manaj.*, vol. 18, no. 1, 2022.
- [3] D. Oktaviana, W. p. Primandhana, and M. Wahed, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan

- EKonomi, Upah Minimum Kabupaten, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Madiun,” *J. Syntax Idea*, vol. 4, no. 1, pp. 1034–149, 2021.
- [4] S. D. Purnomo, “Determinan Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Forum Ekon.*, vol. 21, no. 2, pp. 217–225, 2019.
- [5] N. Zuhdiyaty and D. Kaluge, “Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir,” *J. Ilm. Bisnis dan Ekon. Asia*, vol. 11, no. 2, pp. 27–31, 2018.
- [6] V. B. D. Permatasari and B. Fitanto, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Tingkat Pengangguran, Upah minimum Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur tahun 2012-2017,” *J. Ilm.*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2019.
- [7] D. Ferezegia, “Jurnal Sosial Humaniora Terapan Analisis Tingkat Kemiskinan,” *J. Sos. Hum. Terap.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–6, 2018.
- [8] A. M. Ginting, “Pengaruh Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah Terhadap Kemiskinan Di Indonesia 2004-2013,” *Pus. Penelit. - Badan Keahlian DPR RI*, vol. 20, no. 1, pp. 45–58, 2015.
- [9] D. D. Utama, “Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan,” *Dialogue Can. Philos. Assoc.*, vol. 6, no. 1, pp. 1–12, 2009.
- [10] T. Adriana, “Pengaruh Tingkat Kesehatan, Tingkat pendidikan, dan Produktifitas Terhadap Kemiskinan di Kalimantan,” *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2013.
- [11] K. Ihsan and Ikhsan, “Analisis Pengaruh UMP, Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan DI Provinsi Aceh,” *J. Ilm. Mhs.*, vol. 3, no. 3, pp. 408–419, 2018.
- [12] R. D. Aprilia, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan,” *J. Ilm.*, pp. 1–19, 2016.
- [13] I. Ksatria, “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Sektoral Terhadap Kemiskinan di Indonesia,” vol. 22, no. 1, pp. 82–88, 2022.
- [14] B. Nafi, “Analisis Faktor-Faktor yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (2016-2019),” vol. 7, no. 02, pp. 953–960, 2021.
- [15] Y. C. Pratama, “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI INDONESIA,” *ESENSI*, vol. 4, no. 2, pp. 45–53, 2015.
- [16] I. G. N. J. L. A. Parwa and I. G. W. M. Yasa, “Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Provinsi Bali,” *E-Jurnal EP Unud*, vol. 8, no. 5, pp. 945–973, 2019.
- [17] I. Indrawati, E. Ermawati, and R. Istiqamah, “Pengaruh Pendidikan dan Pekerjaan Terhadap Kemiskinan Rumah Tangga dengan Lingkungan Sebagai Variabel Moderating di Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong,” *J. Ilmu Ekon. dan Bisnis Islam*, vol. 1, no. 2, pp. 38–69, 2020.
- [18] N. Nurhasanah, M. Safri, and J. K. Edi, “Analisis pengaruh tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi,” *e-Jurnal Ekon. Sumberd. dan Lingkung.*, vol. 8, no. 3, pp. 161–169, 2019.
- [19] D. Adam, F. Z. Olilingo, and I. R. Santoso, “Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan

- Di Kawasan Kerjasama Utara-Utara,” *J. Ekon. Pembang. STIE Muhammadiyah Palopo*, vol. 8, no. 1, pp. 97–111, 2022.
- [20] D. Deffrinica, “Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Bengkayang,” *JURKAMI J. Pendidik. Ekon.*, vol. 2, no. 1, pp. 37–47, 2019.
- [21] R. Mardiatillah, M. Panorama, and M. Maftukhatusolikhah, “Pengaruh Pengangguran dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Selatan Tahun 2015-2019,” *J. Intelekt. Keislaman, Sos. dan Sains*, vol. 10, no. 2, pp. 365–370, 2021.
- [22] Y. A. Sari, “Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah,” *Equilib. J. Ilm. Ekon. Manaj. dan Akunt.*, vol. 10, no. 2, pp. 121–130, 2021.
- [23] V. H. Sisca, A. Hamzah, and M. N. Syechalad, “Pengaruh Kesempatan Kerja, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh,” *J. Magister Ilmu Ekon.*, vol. 1, no. 4, pp. 21–30, 2013.
- [24] R. Widyasworo, “Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan Dan Kesempatan Kerja Wanita Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Gresik,” *J. Ilm. Mhs. FEB*, vol. 2, no. 1, pp. 3–17, 2014.
- [25] R. Erdkhadifa, “Pemodelan Spasial Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur dengan Geographically Weighted Regression,” *Statistika*, vol. 21, no. 2, pp. 85–97, 2021.